KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

VOL. 11 NO. 3 | JULI - SEPTEMBER 2026

POLICY BRIEF

Pendekatan Strategis Indonesia di Kawasan Arktik

Mendayung di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia-Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender

Penguatan Female Engagement Team Indonesia dalam MONUSCO melalui Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package

DEWAN REDAKSI

PENGARAH
KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR
APUL SIHOMBING

REDAKTUR
1. ERRY HERJUNO
2. REINHARDT KLAUSSURINKA
3. M. FATTAH H.H

EDITOR
1. KARIMA TAUSHIA A
2. YUDHI MUHAMMAD F.R
3. ALDILA AVEZINE
4. VIA FIDE ADITYA A.R

SEKRETARIAT
1. ACHRAM IVEL
2. NURUL UTAMI
3. PURWADI
4. NURMASELLA P



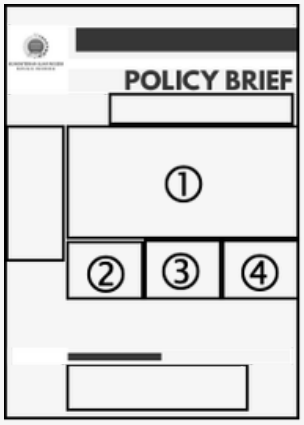






BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI, LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508



SUMBER GAMBAR / FOTO

1. Faizasyah, T. (2026, 26 Oktober). Indonesia dalam kelindan beragam isu Arktik. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/indonesia-dalam-kelindan-beragam-isu-arktik
2. Staf FORUM. (2026, 14 September). Kewaspadaan Arktik: Negara-negara kawasan kutub bersatu dan meningkatkan langkah-langkah penanggulangan. Indo-Pacific Defense FORUM. https://ipdefenseforum.com/id/2026/09/kewaspadaan-arktik/
3. SBI. (2024, 16 Januari). Kolaborasi Indo RDB XXXIX-E/MONUSCO tingkatkan rasa aman kaum wanita Desa Tchabi. Kabar SBI. https://kabarsbi.com/kolaborasi-indo-rdb-xxxix-e-monusco-tingkatkan-rasa-aman-kaum-wanita-desa-tchabi/
4. Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). Indonesia tingkatkan kerja sama internasional untuk capai tujuan SDGs. https://www.bappenas.go.id/berita/indonesia-tingkatkan-kerja-sama-internasional-untuk-capai-tujuan-sdgs-zXf1N

POLICY BRIEF

Pendekatan Strategis Indonesia di Kawasan Arktik

DISETUJUI UNTUK PUBLIKASI

Ringkasan Eksekutif

Percepatan cairnya es di kawasan Arktik telah meningkatkan persaingan geopolitik global. Persaingan terjadi melalui perebutan sumber daya alam dan jalur pelayaran strategis. Zona yang menjadi objek kompetisi, khususnya Northern Sea Route diwarnai dinamika polarisasi keamanan antara NATO dan Rusia. Peningkatan peran Tiongkok melalui inisiatif Polar Silk Road juga memicu persaingan lebih intens lagi. Dinamika ini membuat Arktik sebagai kawasan strategis dengan implikasi lintas kawasan, termasuk bagi Indonesia. Jakarta harus menata perhatiannya ke Arktik, terutama terkait perubahan iklim, ketahanan pangan, stabilitas rantai pasok dan adaptasi logistik maritim. Pada sisi lain, terbuka peluang perluasan pasar di kawasan melalui perdagangan komoditas unggulan serta penguatan diplomasi sains. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan strategis selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Langkah dini dapat dilakukan dengan memperkuat peran perwakilan RI di kawasan Arktik. Arah kebijakan yang diberikan tentu untuk meningkatkan kerja sama riset iklim dan kelautan serta menjajaki partisipasi sebagai observer di Arctic Council melalui working groups terkait.

I. Latar Belakang

Persaingan di Kawasan Arktik semakin intensif seiring dengan mencairnya es di daerah kutub. Perubahan iklim fundamental itu membuka akses baru ke sumber daya dan jalur perairan strategis. Area ini tidak lagi dianggap sebagai daerah terpencil, tetapi menjadi medan perebutan pengaruh di antara kekuatan besar dunia.

Persaingan itu juga menciptakan tensi geopolitik dengan peningkatan aktivitas militer oleh Rusia, termasuk upaya AS mengambil alih wilayah Greenland berdasarkan pertimbangan keamanan. Greenland, misalnya, memang memiliki nilai strategis bagi keamanan, ekonomi, dan kepentingan geopolitik AS. Apalagi Washington melihatnya dari akses terhadap mineral kritis, jalur pelayaran Arktik, serta posisi pertahanan di kawasan Atlantik Utara dan Greenland-Iceland-UK gap (GIUK).

Mencairnya permukaan es di Kawasan Arktik membuka Northern Sea Route (NSR) yang dapat mempersingkat waktu tempuh pelayaran antara Eropa dan Asia hingga 40% dibandingkan rute tradisional melalui Terusan Suez. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga meningkatkan pentingnya kolaborasi riset terkait iklim dan early warning system.

Oleh karena itu, peningkatan signifikansi kawasan Arktik memerlukan pendekatan strategis Indonesia. Diharapkan itu terlihat dari respon yang diberikan terhadap dinamika geopolitik, identifikasi sektor potensial perluasan pasar, dan kemitraan di bidang riset.

II. Pembahasan/Substansi

Dinamika Keamanan Kawasan Arktik

Tata Kelola keamanan NATO di kawasan Arktik berfokus pada deterrence khususnya terhadap ancaman Rusia. Langkah NATO di Arktik semakin bulat terlebih dengan masuknya Swedia dan Finlandia sebagai anggota. NATO saat ini diperkuat dengan kapabilitas seperti North American Aerospace Defense Command (NORAD) dan Pituffik Space Base di Greenland. Selain itu, NATO juga didukung Joint Expeditionary Force (JEF) yang dpimpin Inggris Bersama negara-negara Nordik dan Baltik dalam menghadapi ancaman di wilayah High North.

Pendekatan Rusia di kawasan Arktik berkembang dari pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan jalur laut nasional menjadi peningkatan pengaruh militer dan pembukaan jalur laut global alternatif. Hal ini didukung dominasi infrastruktur militer Rusia di pesisir Arktik. Infrastrukturnya termasuk pangkalan udara paling utara di Nagurskoye. Fasilitasnya didukung personel permanen di bawah komando Armada Utara dengan target penguatan tentara aktif hingga 1,5 juta prajurit tahun ini. Kekuatan ini difokuskan pada patrol intensif di sepanjang 3.000 mil laut jalur NSR.

Rusia juga meningkatkan intensitas dengan Tiongkok dalam inisiatif Polar Silk Road. Seiring dengan berkurangnya operasi perusahaan pelayaran di NSR, Rusia beralih ke investasi Tiongkok untuk menopang sejumlah proyek infrastruktur di kawasan Arktik.



Integrasi Ekonomi dan Perluasan Pasar

Terdapat potensi integrasi ekonomi melalui komoditas unggulan perdagangan dengan negara kawasan Arktik:

Negara	Komoditas Ekspor	Kode	Jumlah Ekspor Tahun 2024 (US$)
Denmark	*Palm oil and its fractions*	(HS 1511)	50.011
Swedia	*Palm oil and its fractions*	(HS 1511)	43.710
Finlandia	*Copper, refined (tembaga murni)*	(HS 7403)	30.338
Islandia	*Artificial corundum (Alumina)*	(HS 2818)	25.833
Norwegia	*Nickel mattes*	(HS 7501)	63.888
Kanada	Karet alam	(HS 4001)	115.426
Rusia	*Palm oil and its fractions*	(HS 1511)	538.225

Optimalisasi berbagai komoditas unggulan itu membuka peluang strategis bagi Indonesia memperluas pasar di wilayah Arktik. Sinergi antara komoditas unggulan itu menjadi modal utama dalam mengamankan posisi Indonesia sebagai mitra dagang jangka Panjang di Arktik.

Peluang Kolaborasi Riset dan Pertimbangan Paritsipasi pada Arctic Council

Dalam penjajakan partisipasi pada Arctic Council, pendekatan diplomasi sains dinilai strategis dan feasible di tengah dinamika geopolitik Arktik. Hal ini dapat diupayakan melalui penguatan kolaborasi riset, pertukaran data ilmiah, dan peningkatan kapasitas tenaga peneliti. Indonesia dapat memposisikan diri sebagai affected non-Arctic state, yakni negara non-Arktik yang terdampak secara langsung dan sistemik oleh dinamika perubahan iklim dan lingkungan di kawasan Arktik.

Indonesia melalui BRIN, BMKG, dan UGM dapat berkontribusi secara substantif pada 3 (tiga) working group yang merupakan bagian dari struktur kerja sama di Arctic Council, Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP), Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), dan Protection of the Arcctic Marine Environment (PAME).

III. Rekomendasi Strategis

Melihat dinamika serta peluang yang ada di kawasan Arktik, Indonesia dapat melakukan pendekatan strategis sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip polugri sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran perwakilan RI di kawasan Arktik (Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Ottawa, Helsinki, dan Moskow) dalam upaya identifikasi sektor potensial untuk berbagai bentuk kerja sama.
   - Perwakilan RI di kawasan itu dapat membentuk forum koordinasi untuk berbagi informasi maupun sinkronisasi kebijakan vis-à-vis negara akreditasi, khususnya tata kelola kawasan kutub.
2. Penguatan peran melalui working groups Arctic Council sebagai upaya awal penjajakan keanggotaan dengan status observer state.
   - Perwakilan RI akan menjadi focal point sekaligus wakil Indonesia dalam berbagai pertemuan/kegiatan WG jika Pusat berhalangan mengirimkan pejabat.
3. Penguatan kapasitas ilmiah nasional dan early warning system melalui berbagai bentuk kerja sama konkret dengan institusi riset.
   - Bidang kerja samanya mencakup pemahaman cuaca ekstrem, kenaikan muka laut, dan variabilitas iklim regional, serta pergerakan ikan dalam bentuk akses data iklim dan joint research program.
4. Peningkatan fokus kawasan Arktik oleh satuan kerja regional melalui kerja sama dengan expert kawasan Arktik.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/

POLICY BRIEF

Mendayung di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia-Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender

NASKAH EKSTERNAL TERPILIH
Pandangan dan analisis dalam naskah ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak serta-merta mencerminkan sikap resmi KEMLU c.q. BSKLN.

Ringkasan Eksekutif

Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengembangkan strategi kebijakan untuk kawasan Pasifik melalui perdagangan, diplomasi budaya, dan bantuan pembangunan di Pasifik. Namun, Pacific Elevation belum sepenuhnya berhasil merespons krisis iklim kawasan tersebut. Bantuan Indonesia masih didominasi pendekatan teknokratis dan masculine-coded aid, dan belum memiliki target gender dan iklim terukur, serta belum terjangkar pada 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Pada 2025, muncul peluang strategis baru melalui: Workshop Gender and Climate Finance di Nadi, Fiji, implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030, penguatan Archipelagic and Island States (AIS) Forum, dan pengakuan regional melalui the Women's Internationals Network for Disaster Risk Reduction (WIN DRR) Award. Policy brief ini merekomendasikan pembentukan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP) melalui dua pilar utama: Gender-Climate Fellowship dan pilot rehabilitasi mangrove berbasis komunitas perempuan pesisir. Program tersebut dijangkarkan pada 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent dan diimplementasikan melalui AIS Forum serta triangular cooperation bersama Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat mentransformasikan Pacific Elevation dari diplomasi simbolik menuju kemitraan iklim yang lebih inklusif, terukur, dan relevan bagi kawasan Pasifik.

I. Latar Belakang

Sejak peluncuran Pacific Elevation di Auckland pada 2019, Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik melalui diplomasi pembangunan, perdagangan, dan kerja sama maritim.[1] Kebijakan ini didukung dengan pembentukan Indonesian Aid/Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), endowment fund sebesar AUD 1 miliar, serta Indonesia-Pacific Development Forum (IPDF) sebagai platform bantuan teknis kawasan.[2] Hingga 2025, Indonesia tercatat menjalankan sedikitnya 13 program bantuan pembangunan di lima negara kepulauan Pasifik melalui kerja sama kebencanaan, pertanian, dan pembangunan kapasitas pesisir. Namun, progres ini berdampingan dengan keterbatasan substantif dalam implementasi Pacific Elevation.[3]

Pacific Elevation masih didominasi bantuan teknokratis dan masculine-coded aid seperti pelatihan birokrasi dan bantuan peralatan fisik. Program yang berjalan juga belum memiliki target terukur berbasis gender dan iklim. Selain itu, -program belum sepenuhnya terhubung dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent sebagai kerangka pembangunan utama kawasan.

Pada saat yang sama, sepanjang 2025 muncul tiga sinyal demand baru di Pasifik.Workshop Gender and Climate Finance di Nadi, Fiji, pada 25–27 November 2025 yang melibatkan 16 negara Pasifik menunjukkan meningkatnya kebutuhan kawasan terhadap gender-responsive climate action.[4] Indonesia juga mulai mengimplementasikan RAN-GPI 2024–2030 sebagai model domestik yang berpotensi diekspor ke tingkat kawasan.[5]

[1] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia-Pacific Forum and Pacific Elevation Initiative, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2019.
[2] H.Y. Simatupang, Oktaviani, dan R. Novialdi. Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia sebagai New Emerging Country. PIR Journal 8, no. 1. 2023: 55–67.
[3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2026.
[4] GGGI Pacific, *Empowering Pacific Women in Climate Action*, Fiji: GGGI Pacific, 25 November, 2025.
[5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) Indonesia 2024–2030, Jakarta: KemenPPPA RI, 2024.

Selain itu, WIN DRR Award 2025 kepada Nashin Mahtani dan Lisa Redfern memperkuat perhatian regional terhadap kepemimpinan perempuan dalam ketahanan iklim dan kebencanaan.[6]
Konvergensi sinyal ini membuka peluang reposisi Pacific Elevation menuju kerja sama iklim yang strategis, efektif dan relevan dengan kebutuhan kawasan. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan konvergensi ini untuk mengubah Pacific Elevation dari postur defensif menjadi kemitraan iklim yang lebih substantif, inklusif, dan relevan bagi negara-negara Pasifik. Pembahasan berikut menjawab pertanyaan ini melalui empat lapis analisis terkait instrumen, narasi, kelembagaan, dan peluang implementasi kebijakan baru.

II. Pembahasan/Substansi

Pacific Elevation masih menghadapi empat keterbatasan utama yang saling berkelindan dan membentuk implementation deficit. Pertama, instrumen bantuan masih didominasi pendekatan teknis dan peralatan (masculine-coded aid) yang tidak menjawab kebutuhan adaptasi sosial berbasis komunitas perempuan pesisir. Kedua, narasi diplomasi berbasis kedekatan budaya berisiko menghasilkan persepsi cultural co-optation alih-alih solidaritas berbasis kerentanan iklim bersama. Ketiga, Archipelagic and Island States (AIS) Forum belum dioptimalkan sebagai platform kerja sama gender–iklim yang operasional, melainkan masih bersifat forum deklaratif. Keempat, ketiadaan indikator gender-disaggregated dan climate-tagged financing menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan pengukuran dampak program. Kombinasi keempat hal ini menghasilkan kondisi yang membuat Pacific Elevation lebih bersifat simbolik dibanding substantif. Oleh karenanya masih belum mampu menjawab prioritas utama kawasan Pasifik: krisis iklim dan ketimpangan gender.
Keterbatasan tersebut semakin terlihat jika dibandingkan dengan pendekatan aktor lain di kawasan:

- Australia mengembangkan program gender dan climate resilience, tetapi masih dibayangi colonial legacy.[7]
- Selandia Baru berfokus pada community resilience, namun skala program masih terbatas.[8]
- Tiongkok memperluas pengaruh melalui infrastruktur, tetapi belum memiliki gender lens kuat.[9]
- India mengembangkan South-South Cooperation, namun belum fokus pada Pasifik dan gender.[10]
- Indonesia masih menggunakan bantuan ad hoc yang belum terukur dan belum terhubung dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. [11]

Meski demikian, Indonesia memiliki comparative advantage yang tidak dimiliki aktor lain yaitu identitas authentic Global South partner, pengalaman domestik melalui RAN-GPI 2024–2030, dan kapasitas perempuan Indonesia Timur sebagai peer-to-peer trainer bagi komunitas pesisir Pasifik. Berdasarkan kondisi tersebut, policy brief ini menawarkan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP) sebagai model reposisi strategis Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia di Pasifik yang menggeser orientasi dari bantuan ad hoc menuju kemitraan iklim yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi hasil.

Kerangka ini mengintegrasikan penguatan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola iklim dengan pengembangan ekonomi pesisir berbasis komunitas. Hal ini secara langsung merespons kesenjangan struktural dalam implementasi *Pacific Elevation* yang masih didominasi pendekatan teknokratis. Dalam kerangka operasionalnya, IPCGP terdiri atas dua pilar yang saling memperkuat. Pilar pertama adalah Gender-Climate Fellowship yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan Pasifik dalam tata kelola iklim, pembiayaan iklim, dan ketahanan pesisir.

Program ini ditargetkan secara terukur dengan melibatkan 20 peserta setiap tahun, dan menghasilkan 100 alumni dalam lima tahun, serta memastikan minimal 50 persen alumni berada dalam posisi atau institusi pengambilan keputusan terkait iklim di negara masing-masing.[12]

[6] UN Women Asia-Pacific, Pacific Workshop on Gender-Responsive Climate Finance Concludes in Nadi, Bangkok: UN Women Asia-Pacific, 27 November, 2025.
[7] Ann R. Tickamyer, Siti Kusujiarti, Colonial Legacies and Postcolonial Agendas: Gender,Disaster and Climate Change in Indonesia and beyond, Indonesia-Pacific Forum and Pacific Elevation Initiative, Buletin of Indonesian Economic Studies. 2025: 357-377.
[8] Michelle McCormick, Building resilience a priority for New Zealand, NZ Infrastructure, 2024.
[9] Jessica Collins, China and Taiwan Are Big Pacific Donors - But Not for Gender Equality, The News Lens International Edition, November 24, 2023.
[10] The Asia Foundation, Advancing South-South Cooperation: India's Development Partnerships with Pacific Island Countries, August 20, 2021
[11] PACIS Universitas Katolik Parahyangan, FGD Report: Grand Design Strategi Kebijakan Pasifik Era Prabowo (GDSKPE), Bandung: PACIS Universitas Katolik Parahyangan, 2024.

Implementasinya bersifat realistis dengan memanfaatkan ekosistem RAN-GPI 2024–2030, dukungan UN Women, dan jejaring universitas di Indonesia. Untuk memastikan relevansi kebijakan, indikator kinerja mencakup jumlah gender-tagged climate finance proposals yang diajukan alumni ke Green Climate Fund (GCF) atau Adaptation Fund (AF), tingkat keberhasilan pendanaan, serta kontribusi alumni dalam memengaruhi kebijakan iklim nasional di negara asalnya. Program ini dirancang berkelanjutan dalam periode 2026–2031. Pilar kedua adalah Pilot Mangrove and Coastal Adaptation Project berfokus pada restorasi ekosistem pesisir berbasis komunitas perempuan di Adaut, Pulau Langkai, Fiji, Tuvalu, dan Solomon Islands melalui model koperasi perempuan. Program ini menargetkan restorasi 500 hektare mangrove dalam tiga tahun, peningkatan pendapatan rumah tangga perempuan sebesar 30%, serta penguatan ekonomi pesisir yang lebih resilien. Pelaksanaannya didukung oleh kapasitas teknis Indonesia dalam rehabilitasi mangrove dan ketahanan bencana, serta prinsip co-production dengan mitra Pasifik. Indikator keberhasilan mencakup luas area mangrove yang dikelola oleh koperasi perempuan, proporsi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan koperasi (minimal 40%), tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan adaptasi pesisir, serta penurunan tingkat kerentanan pesisir berdasarkan indeks lokal. Dengan desain ini, kedua pilar IPCGP membentuk satu kesatuan instrumen yang tidak hanya operasional, tetapi juga terukur, berbasis hasil, dan relevan terhadap agenda keadilan iklim regional.

Seluruh program dijangkakan pada 2050 *Strategy for the Blue Pacific Continent*, dioperasionalisasikan melalui AIS Forum, dan didukung *triangular cooperation* bersama Australia, Selandia Baru, dan Kanada.[13]

[12] UN Women Asia-Pacific, Pacific Workshop on Gender-Responsive Climate Finance Concludes in Nadi, Bangkok: UN Women Asia-Pacific, November 27, 2025.

[13] Pacific Islands Forum Secretariat, 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent, Suva: Pacific Islands Forum Secretariat, 2022.

Meskipun IPCGP dirancang sebagai instrumen reposisi strategis yang lebih substantif, implementasinya tetap menghadapi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi sejak tahap awal desain kebijakan. Pertama, terdapat risiko resistensi politik regional (Pacific pushback risk), yang sebagian aktor Pasifik dapat memandang keterlibatan Indonesia masih berada dalam kerangka Jakarta-sentris dan belum sepenuhnya bebas dari sensitivitas isu politik yang selama ini memengaruhi persepsi kawasan.[14]

Kedua, risiko aid fatigue dan donor crowding menjadi relevan karena Pasifik merupakan kawasan dengan intensitas aktor pembangunan yang tinggi, sehingga tanpa diferensiasi nilai tambah yang jelas, IPCGP berpotensi mengalami marginalisasi dalam lanskap bantuan internasional. Ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan LDKPI, khususnya dalam penerapan gender-tagged budgeting, safeguards system, dan results-based monitoring and evaluation, dapat memengaruhi konsistensi implementasi program di tingkat lapangan. Keempat, risiko gender washing muncul apabila integrasi perspektif gender tidak disertai indikator yang terukur serta keterlibatan substantif perempuan pesisir Pasifik dalam seluruh siklus kebijakan, sehingga program berpotensi direduksi menjadi simbolisme diplomatik.

Kelima, terdapat risiko inter-ministerial misalignment antara Kemlu, KemenPPPA, KKP, Bappenas, dan BNPB yang dapat menyebabkan fragmentasi mandat dan inefisiensi koordinasi implementasi.

Implementasi IPCGP berpotensi menghasilkan empat dampak strategis utama. Pertama, narrative reframing dari diplomasi simbolik menuju solidaritas berbasis ketahanan iklim, dengan perempuan Indonesia Timur sebagai peer-to-peer trainers bagi komunitas Pasifik. Kedua, terciptanya measurable diplomatic gain melalui indikator gender dan iklim yang terukur, sehingga mengatasi kritik atas ketiadaan parameter evaluasi Pacific Elevation. Ketiga, operasionalisasi RAN-GPI 2024–2030 ke tingkat regional, menjadikan Indonesia sebagai salah satu first mover dalam integrasi gender–climate nexus di Global South. Keempat, penguatan posisi Indonesia sebagai authentic Global South partner yang tidak hanya menjadi donor, tetapi juga co-creator dalam tata kelola iklim kawasan Pasifik.[15]

[14] Hipolitus Wangge, "Indonesia's Commitment to the Pacific Needs to Go Beyond Rhetoric," The Diplomat, August 31, 2023.

[15] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 (Jakarta: Kementerian PPPA Republik Indonesia, 2025).

III. Rekomendasi Kebijakan

Pacific Elevation telah memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kawasan terkait ketahanan iklim dan inklusi gender. Momentum 2024–2025 melalui RAN-GPI, AIS Forum, dan meningkatnya agenda gender-responsive climate action membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mereposisi kerja sama Selatan-Selatan melalui IPCGP. Melalui pendekatan ekonomi biru, perempuan pesisir, dan kerja sama triangular, IPCGP dapat mengubah Pacific Elevation dari diplomasi simbolik menjadi kemitraan iklim yang lebih substantif, terukur, dan relevan bagi negara-negara Pasifik.

Oleh sebab itu, dalam upaya implementasinya, diperlukan kolaborasi tindakan nyata dan langkah kebijakan yang terkoordinasi serta realistis dari negara hingga masyarakat sipil. Hal ini agar agenda gender dan ketahanan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain:

- Kemlu RI sebagai pihak utama dalam menjadikan gender-climate cooperation sebagai pilar keempat Grand Design of Indonesia's Policy Strategy for the Pacific Region (GDSKPE) / Pacific Elevation serta mengarus utamakan agenda tersebut dalam diplomasi Indonesia di Pasifik. Kemlu juga berperan sebagai political lead dalam memastikan keselarasan IPCGP dengan prioritas politik luar negeri Indonesia.
- LDKPI/Indonesian Aid dapat mengalokasikan 25% endowment fund atau sekitar AUD 15 juta per tahun untuk IPCGP melalui skema triangular cooperation, sekaligus memastikan pendanaan berbasis indikator gender-tagged financing.
- KemenPPPA dan KLHK dapat membentuk Tim Operasionalisasi Luar Negeri RAN-GPI untuk koordinasi program gender dan iklim di Pasifik.
- Sekretariat AIS Forum dapat menetapkan Gender-Responsive Blue Economy sebagai agenda prioritas AIS Summit berikutnya, sekaligus memperkuat AIS sebagai platform operasional kerja sama gender–iklim kawasan kepulauan.
- Universitas Pertamina dan PACIS UNPAR perlu mengembangkan Gender-Climate Baseline Index for the Pacific sebagai instrumen evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak kebijakan IPCGP secara berkala dan terstandarisasi.
- Pemerintah Daerah Maluku, NTT, dan Papua juga dapat memfasilitasi keterlibatan perempuan adat sebagai peer-to-peer trainers dalam program adaptasi pesisir dan ekonomi biru, khususnya pada level komunitas pesisir rentan.
- DPR RI Komisi I dan VIII memiliki andil dalam memperkuat implementasi gender-responsive budgeting dalam kebijakan kerja sama Selatan–Selatan Indonesia serta memastikan akuntabilitas anggaran IPCGP.
- FPCI, IGJ, KPI, dan organisasi masyarakat sipil dapat membentuk Track-2 Coalition untuk memperkuat advokasi, pengawasan, dan jejaring non-pemerintah dalam implementasi kerja sama gender dan iklim Indonesia–Pasifik.

Daftar Pustaka

AKSES Kemlu RI. 2019. “Pacific Exposition 2019: Berawal dari Persahabatan dan Demi Persahabatan.” In *AKSES Gerbang Menuju Pasar Dunia*. Vol. 36. N.p.: Akses Kemlu RI. https://kemlu.go.id/files/repositori/56577/AKSES%2036%20November%202019.pdf.

The Asia Foundation. 2021. “Advancing South-South Cooperation: India’s Development Partnerships with Pacific Island Countries.” https://asiafoundation.org/publication/advancing-south-south-cooperation-indias-development-partnerships-with-pacific-island-countries/.

Collins, Jessica. 2023. “, China and Taiwan Are Big Pacific Donors - But Not for Gender Equality.” The News Lens International Edition. 6, https://international.thenewslens.com/article/186682.

GGGI Pacific. 2025. “Empowering Pacific Women in Climate Action.” GGGI Pacific. https://gggi.org/empowering-pacific-women-in-climate-action/.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019. Indonesia-Pacific Forum and Pacific Elevation Initiative. Vol. 36. Jakarta: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. https://kemlu.go.id/files/repositori/56577/AKSES%2036%20November%202019.pdf.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2026. Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029. Jakarta: n.p. https://kemlu.go.id/files/repositori/65386/176896356169703de944359_RENSTRA_PASOS_2025_2029.pdf.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. 2024. Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) Indonesia 2024–2030. N.p.: KemenPPPA RI. https://lenting.fprbprovinsintt.com/repositori/rencana-aksi-nasional-gender-dan-perubahan-iklim-ran-gpi-indonesia-2024-2030/.

McCormick, Michelle. 2024. “Building resilience a priority for New Zealand.” NZ Infrastructure. https://nzinfrastructure.nz/building-resilience-a-priority-for-new-zealand/.

Pacific Islands Forum Secretariat. 2022. 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Suva: Pacific Islands Forum Secretariat. https://forumsec.org/sites/default/files/2023-11/PIFS-2050-Strategy-Blue-Pacific-Continent-WEB-5Aug2022-1.pdf.

PACIS Universitas Katolik Parahyangan. 2024. “FGD Report: Grand Design Strategi Kebijakan Pasifik Era Prabowo (GDSKPE).” https://pacis.unpar.ac.id/id/tag/gdskpe-id/.

Simatupang, H. Y., J. Oktaviani, and R. Novialdi. 2023. “Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia sebagai New Emerging Country.” PIR Jurnal 8 (1): 55-67. https://pdfs.semanticscholar.org/663f/c6439adeee619889908944d77c23ad864cf5.pdf.

Tickmayer, A. R., and Siti Kusujiarti. 2025. “Colonial Legacies and Postcolonial Agendas: Gender,Disaster and Climate Change in Indonesia and beyond, Indonesia-Pacific Forum and Pacific Elevation Initiative.” Buletin of Indonesian Economic Studies. https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2569809.

UN Women Asia-Pasific. 2025. “Pacific Workshop on Gender-Responsive Climate Finance Concludes in Nadi.” https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2025/11/advancing-equitable-green-growth-in-the-pacific-nadi.

Wangge, H. 2023. Indonesia's Commitment to the Pacific Needs to Go Beyond Rhetoric. N.p.: The Diplomat. https://thediplomat.com/2023/08/indonesias-commitment-to-the-pacific-needs-to-go-beyond-rhetoric/

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/

POLICY BRIEF

Dari Kuota ke Kapabilitas: Penguatan Female Engagement Team Indonesia dalam MONUSCO melalui Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package

NASKAH EKSTERNAL TERPILIH
pandangan dan analisis dalam naskah ini sepenuhnya
jawab penulis dan tidak serta-merta mencerminkan sikap resmi
KEMLU c.q. BSKLN.

Ringkasan Eksekutif

Policy brief ini merekomendasikan pembentukan Indonesia Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package for MONUSCO untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebijakan yang ditinjau adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029, khususnya agenda penguatan kontribusi Indonesia dalam operasi perdamaian PBB. Republik Demokratik Kongo (RDK) dipilih karena mempertemukan krisis perlindungan gender, mandat perlindungan warga sipil United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO), dan pengalaman operasional Indonesia melalui Female Engagement Team (FET) sebagai mekanisme pelibatan komunitas oleh personel perempuan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modalitas awal dalam pelibatan komunitas, pembangunan kepercayaan dengan perempuan terdampak konflik. Namun, berdasarkan dokumen publik literatur akademik yang dikaji, praktik FET Indonesia dalam MONUSCO belum tampak dibakukan dalam kerangka operasional nasional yang berkelanjutan. Karena itu, paket kapabilitas direkomendasikan melalui modul pra-penugasan, SOP pelaporan aman, peta aktor rujukan, indikator kinerja, dan evaluasi pasca-penugasan.

I. Latar Belakang

Kebijakan yang ditinjau dalam policy brief ini adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029 (Renstra Kemenlu 2025–2029). Renstra tersebut menjadi dasar perencanaan politik luar negeri Indonesia, termasuk agenda peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global serta optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran sepuluh besar negara kontributor Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB).[1] Arah ini perlu dibaca bersama kebijakan Departemen Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Department of Peace Operations/DPO) tentang operasi perdamaian responsif gender, yang menekankan pentingnya analisis responsif gender, paritas gender, dan partisipasi bermakna perempuan dalam pelaksanaan misi.[2] Oleh karenanya, penguatan women peacekeepers Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai penambahan jumlah personel perempuan, tetapi perlu diarahkan pada kapabilitas operasional yang memperkuat perlindungan komunitas lokal sekaligus menerjemahkan Bandung Spirit ke dalam solidaritas Global South dalam misi PBB.

Republik Demokratik Kongo (RDK) dipilih sebagai fokus kebijakan karena mempertemukan tiga kondisi strategis: krisis perlindungan gender yang akut, mandat perlindungan warga sipil MONUSCO, dan pengalaman operasional Indonesia melalui FET. Pada 2024, MONUSCO mendokumentasikan 823 kasus kekerasan seksual terkait konflik (conflict-related sexual violence/CRSV) yang menimpa 416 perempuan, 391 anak perempuan, 7 anak laki-laki, dan 9 laki-laki.[3] Doctors Without Borders juga mencatat 25.166 korban dan penyintas kekerasan seksual dirawat pada 2023, serta 17.363 korban dan penyintas pada Januari–Mei 2024.[4] Data tersebut menunjukkan bahwa RDK bukan sekadar wilayah konflik, melainkan arena konkret tempat agenda Women, Peace and Security (WPS), mandat perlindungan warga sipil, dan diplomasi gender Indonesia diuji secara langsung.

[1] United Nations Secretary-General, Conflict-Related Sexual Violence: Report of United Nations Secretary-General (Office of The Special Representative of The Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, 2026), https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2025/08/report/report-of-the-secretary-general-on-conflict-related-sexual-violence/SG-Report-2024-FINAL.pdf.
[2] MSF Teams, "DRC: MSF Report Reveals Explosion of Sexual Violence in 2023," October 1, 2024, https://msf.org.uk/article/drc-msf-report-reveals-explosion-sexual-violence-2023.
[3] United Nations Secretary-General, Conflict-Related Sexual Violence: Report of United Nations Secretary-General (Office of The Special Representative of The Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, 2026), https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2025/08/report/report-of-the-secretary-general-on-conflict-related-sexual-violence/SG-Report-2024-FINAL.pdf.

Dalam konteks Indonesia, FET telah hadir melalui pengalaman Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda XXXIX dalam MONUSCO. FET mampu menjangkau komunitas yang sulit diakses personel laki-laki, terutama perempuan terdampak konflik. Namun, keberhasilan tersebut belum otomatis menjadi kapabilitas nasional yang terlembaga lintas rotasi penugasan. Permasalahan utama yang diangkat dalam policy brief ini adalah belum tampaknya pembakuan kerangka operasional FET Indonesia dalam MONUSCO, terutama terkait modul pra-penugasan, SOP pelaporan aman, peta aktor rujukan, indikator kinerja, dan evaluasi pasca-penugasan. Oleh karenanya, policy brief ini merekomendasikan Indonesia Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package for MONUSCO sebagai solusi untuk menggeser kontribusi Indonesia dari orientasi kuota menuju kapabilitas.

II. Pembahasan/Substansi

Masalah utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar rendahnya jumlah women peacekeepers, melainkan belum terlembagakannya praktik FET sebagai kapabilitas strategis yang dapat direplikasi lintas rotasi penugasan. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan 1.049 personel dalam MONUSCO, terdiri dari 1.001 laki-laki dan 48 perempuan. Dari 48 personel perempuan tersebut, 39 berada pada kategori troops, 4 individual police, 4 staff officer, dan 1 expert on mission.[5] Dibandingkan target gender parity United Nations Peacekeeping, yaitu 11% perempuan untuk kategori troops, proporsi perempuan Indonesia pada kategori troops dalam MONUSCO baru sekitar 3,80%.[7]Dalam policy brief ini, women peacekeepers dipahami sebagai seluruh personel perempuan Indonesia dalam misi perdamaian, sedangkan FET dipahami sebagai mekanisme operasional yang dijalankan oleh sebagian personel perempuan dengan fungsi khusus dalam komunitas, komunikasi aman, dan rujukan penyintas.

[4] MSF Teams, "DRC: MSF Report Reveals Explosion of Sexual Violence in 2023," October 1, 2024, https://msf.org.uk/article/drc-msf-report-reveals-explosion-sexual-violence-2023.

[5] United Nations Department of Peace Operations., "Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country, Mission, and Personnel Type: Experts on Mission, Formed Police Units, Individual Police, Staff Officer, and Troops," Document, June 30, 2024.

FET Indonesia dalam MONUSCO telah menunjukkan modalitas awal melalui Civil-Military Coordination (CIMIC), terutama melalui Smart Library, Psychological Treatment, dan Medical Assistance.[6] Namun, praktik tersebut masih tampak sebagai pengalaman satuan tugas tertentu, bukan kerangka operasional strategis yang dibakukan.

Gambar 1. Kerangka Penguatan FET



[6] Nur; Pasan Rezkiawati Etha; Frisca Alexandra Ps, "Keterlibatan Tentara Wanita Indonesia Dalam Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda XXXIX Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2022," Kajian Hubungan Internasional, no. Vol. 4 No. 2 (2025) (2025): 1–15.

Sumber: Data diolah oleh penulis

Gambar tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama berada pada transisi dari representasi kuantitatif menuju kapabilitas operasional. Status quo membuat praktik FET bergantung pada karakter satuan tugas atau inisiatif individu. Fokus kuota memang penting, tetapi tidak cukup menjamin kemampuan FET dalam perlindungan komunitas lokal, komunikasi aman, dan rujukan penyintas.

Gambar 2. Analisis SMART



Sumber: Data diolah oleh penulis

Gambar diagram analisis metode SMART diatas menunjukkan bahwa Indonesia Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package for MONUSCO merupakan rekomendasi yang spesifik karena diarahkan pada penguatan Female Engagement Team (FET) Indonesia dalam MONUSCO melalui lima instrumen operasional: modul pra-penugasan FET khusus MONUSCO, SOP pelaporan dan rujukan aman, peta aktor rujukan berbasis mandat, indikator kinerja responsif gender, serta evaluasi pasca penugasan. Rekomendasi ini tidak hanya menempatkan women peacekeepers melalui FET sebagai angka representasi, melainkan sebagai aktor operasional yang berperan dalam komunitas, komunikasi aman, dan perlindungan warga sipil. Relevansi aspek ini semakin kuat karena persoalan utama bukan ketiadaan FET, melainkan belum tampaknya pembakuan kerangka operasional yang memastikan praktik FET Indonesia dalam MONUSCO dapat berlanjut dari satu periode ke periode penugasan berikutnya. Dari aspek measurable dan achievable, paket kebijakan ini memiliki keluaran yang dapat diukur sekaligus realistis untuk dilaksanakan. Keluaran kebijakan dapat dilihat melalui tersusunnya modul pelatihan, SOP rujukan aman, matriks aktor rujukan, indikator kinerja, dan laporan lessons learned pasca-penugasan. Ukuran tersebut penting karena kebijakan operasi perdamaian responsif gender menekankan perlunya analisis gender, indikator, data, paritas, dan partisipasi bermakna perempuan dalam perencanaan serta pelaksanaan misi.[7]

Secara kelembagaan, rekomendasi ini juga realistis karena tidak menuntut pembentukan struktur baru, melainkan memperkuat mekanisme yang telah tersedia melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri, PMPP TNI, Kontingen Garuda, dan struktur MONUSCO. Pengalaman FET Indonesia dalam Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda XXXIX menunjukkan bahwa FET telah memiliki modalitas operasional dalam menjangkau komunitas yang sulit diakses personel laki-laki, terutama perempuan terdampak konflik, melalui kegiatan Civil-Military Coordination.[8]

Rekomendasi ini selaras dengan Renstra Kemenlu 2025–2029 dan dapat dilaksanakan secara bertahap: penyusunan modul, SOP, dan peta aktor rujukan dalam 0-6 bulan; uji coba penerapan pada rotasi penugasan berikutnya dalam 6-12 bulan; serta evaluasi, pembaruan intrumen, dan replikasi praktik baik dalam 12-24 bulan.[9]

Relevansi tersebut semakin kuat karena konteks RDK memperlihatkan kebutuhan perlindungan gender yang tinggi.

[7] United Nations Department of Peace Operations., Gender-Responsive United Nations Peacekeeping Operations.
[8]Rezkiawati, "Keterlibatan Tentara Wanita Indonesia Dalam Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda XXXIX Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2022."
[9] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029."

Seperti yang sudah dibahas dalam bagian Pembahasan/Substansi, argumentasi ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan 1.049 personel dalam MONUSCO per 30 Juni 2024, terdiri atas 1.001 laki-laki dan 48 perempuan. Berdasarkan jumlah, perempuan pada kategori troops hanya 39 personel atau sekitar 3,80%. Hal ini masih di bawah target gender parity PBB untuk kategori troops perempuan sebesar 11%.[10]

Dengan strategi yang sistematis mulai dari penyusunan modul pelatihan, SOP, dan matriks rujukan pada tahap pra-penugasan; penerapan indikator dan koordinasi rujukan selama penugasan; serta evaluasi dan pembaruan instrumen pada tahap pasca-penugasan. Kebijakan ini akan membawa Indonesia selangkah lebih maju sebagai aktor perdamaian dunia.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap urgensi penguatan FET Indonesia dalam MONUSCO, arah kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan menggeser orientasi kontribusi women peacekeepers Indonesia dari pemenuhan kuota menuju penguatan kapabilitas operasional yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, policy brief ini merekomendasikan Indonesia Gender-ResponsivePeacekeeping Capability Package for MONUSCO sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat peran FET Indonesia dalam pelibatan komunitas, perlindungan warga sipil, komunikasi aman, dan rujukan aman penyintas kekerasan seksual terkait konflik.

[10] United Nations Department of Peace Operations., "Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country, Mission, and Personnel Type: Experts on Mission, Formed Police Units, Individual Police, Staff Officer, and Troops."

Paket kebijakan tersebut terdiri atas lima instrumen operasional dan satu strategi diplomatik, yang dijabarkan dalam enam rekomendasi berikut:

1. **Integrasi Modul Pra-Penugasan FET untuk MONUSCO**. Aktor utama: PMPP TNI. Aktor pendukung: Kementerian Luar Negeri RI, Kontingen Garuda, Gender Unit MONUSCO. Isi kebijakan: Penyusunan dan integrasi modul pra-penugasan khusus FET untuk konteks MONUSCO. Modul ini memuat konteks konflik RDK, mandat MONUSCO, prinsip Women, Peace and Security, perlindungan warga sipil, komunikasi aman, sensitivitas gender, perlindungan identitas penyintas, prinsip do no harm, serta batas kewenangan FET.

Indikator: Modul tersedia, minimal satu sesi pelatihan khusus FET dilaksanakan sebelum rotasi, seluruh personel FET mengikuti pelatihan, materi pelatihan masuk dalam kurikulum pra-penugasan MONUSCO. Waktu: 0-6 bulan.

2.**Penyusunan SOP Komunikasi dan Rujukan Aman.** Aktor utama: PMPP TNI dan Kontingen Indonesia di MONUSCO. Aktor pendukung: Kementerian Luar Negeri RI, Gender unit MONUSCO, unit perlindungan warga sipil MONUSCO, dan aktor layanan terkait. Isi kebijakan: Penyusunan SOP yang mengatur komunikasi awal dengan penyintas, perlindungan identitas, prinsip persetujuan penyintas, pencatatan terbatas, serta jalur rujukan resmi. SOP ini harus menegaskan bahwa FET bukan penyidik, tenaga medis, pekerja sosial, atau pengelola kasus, melainkan penghubung awal dan pendukung komunikasi aman. Indikator: SOP tersedia dan disosialisasikan, personel FET memahami mandat, mekanisme rujukan resmi terdokumentasi, tidak ada praktik rujukan yang membuka identitas penyintas tanpa persetujuan. Waktu: 0-6 bulan.

3.**Penyusunan peta aktor rujukan berbasis mandat.** Aktor utama: Kontingen Indonesia di MONUSCO melalui unsur CIMIC dan FET. Aktor pendukung: Gender Unit MONUSCO, unit perlindungan warga sipil MONUSCO, aktor kemanusiaan, fasilitas kesehatan lokal, dan organisasi perempuan lokal. Isi kebijakan: Penyusunan peta aktor rujukan yang membedakan peran setiap aktor berdasarkan mandatnya.Peta ini mencakup unsur Internal Kontingen Indonesia, unit internal MONUSCO terkait gender dan perlindungan warga sipil, aktor kemanusiaan, fasilitas kesehatan lokal, serta organisasi perempuan lokal yang memiliki akses sosial terhadap komunitas terdampak. Indikator: Peta aktor rujukan tersedia, peta diperbarui pada setiap rotasi, FET memiliki daftar rujukan resmi yang jelas, jalur rujukan disesuaikan dengan perubahan kondisi keamanan dan akses layanan di lapangan. Waktu: Disusun pada awal rotasi dan diperbarui setiap rotasi penugasan.

4.**Perumusan indikator kinerja responsif gender untuk FET**. Aktor utama: Kementerian Luar Negeri dan PMPP TNI. Aktor pendukung: Kontingen Garuda, Gender Unit MONUSCO, dan unit evaluasi misi. Isi kebijakan: Perumusan indikator kinerja FET berbasis gender-responsive peacekeeping yang tidak hanya mengukur jumlah personel perempuan, tetapi juga kualitas kontribusi operasional FET. Indikator perlu mencakup pelatihan, kegiatan perlibatan komunitas, pembaruan peta rujukan, koordinasi dengan unit MONUSCO, serta evaluasi pasca penugasan Indikator: Jumlah personel FET yang mengikuti pelatihan khusus, ketersediaan SOP komunikasi dan rujukan aman, jumlah kegiatan perlibatan komunitas yang terdokumentasi, pembaruan peta aktor rujukan, koordinasi dengan unit MONUSCO terkait gender dan perlindungan warga sipil, laporan evaluasi pasca penugasan tersedia. Waktu: 6-12 bulan.

5. **Evaluasi Pasca Penugasan dan Basis Pengetahuan Kelembagaan.** Aktor utama: PMPP TNI. Aktor pendukung: Kementerian Luar Negeri RI, Kontingen Garuda, dan personel FET yang telah menyelesaikan penugasan. Isi kebijakan: Pelaksanaan evalusi pasca penugasan pada setiap rotasi FET Indonesia di MONUSCO. Evaluasi ini memuat praktik baik, hambatan lapangan, efektivitas SOP, kebutuhan pelatihan tambahan, perubahan kondisi aktor rujukan, dan rekomendasi untuk rotasi berikutnya. Indikator: Laporan lessons learned tersedia pada setiap akhir rotasi, rekomendasi evaluasi digunakan untuk memperbarui modul, SOP, dan peta aktor rujukan, pengalaman personel tidak berhenti sebagai pengalaman individual, tetapi menjadi basis pengetahuan kelembagan. Waktu: Setiap akhir rotasi penugasan.

6. **FET sebagai Instrumen Diplomasi Perdamaian Indonesia Berbasis Gender.** Aktor utama: Kementerian Luar Negeri RI. Aktor pendukung: PMPP TNI, Kontingen Garuda, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, serta forum ASEAN dan Global South yang relevan. Isi kebijakan: Penguatan FET ditempatkan sebagai bagian dari diplomasi perdamaian Indonesia berbasis gender. Melalui pembakuan praktik FET di MONUSCO, Indonesia dapat menunjukkan kontribusi konkret terhadap agenda Women, Peace and Security, perlindungan warga sipil, dan operasi perdamaian responsif gender. Kebijakan ini juga dapat menjadi model praktik baik Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan. Indikator: Praktik FET Indonesia terdokumentasi sebagai model kebijakan, pengalaman FET digunakan dalam forum PBB, ASEAN, dan Global South, Indonesia tidak hanya hadir sebagai kontributor pasukan, tetapi juga sebagai pengusul praktik perdamaian inklusif dan responsif gender. Waktu: 12-24 bulan.

Dengan demikian, Indonesia Gender-Responsive Peacekeeping Capability Package for MONUSCO menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat kapabilitas FET Indonesia secara terukur, berkelanjutan, dan berbasis mandat. Melalui paket ini, Indonesia dapat bergerak melampaui kontribusi berbasis kuota menuju kontribusi substansif dalam perlindungan warga sipil, pelibatan komunitas, dan komunikasi aman, dan rujukan aman penyintas kekerasan seksual terkait konflik. Dalam kerangka Bandung Spirit, kebijakan ini menegaskan peran Indonesia sebagai aktor Global South yang tidak hanya berpartisipasi dalam misi perdamaian, tetapi juga menawarkan praktik perdamaian yang inklusif, responsif gender, dan dapat direplikasi dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Daftar Pustaka

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029." November 17, 2025. https://jdih.kemlu.go.id/dokumen/109635.

MSF Teams. "DRC: MSF Report Reveals Explosion of Sexual Violence in 2023." October 1, 2024. https://msf.org.uk/article/drc-msf-report-reveals-explosion-sexual-violence-2023.

Rezkiawati, Nur; Pasan, Etha; Frisca Alexandra Ps. "Keterlibatan Tentara Wanita Indonesia Dalam Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda XXXIX Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2022." Kajian Hubungan Internasional, no. Vol. 4 No. 2 (2025) (2025): 1–15.

United Nations Department of Peace Operations. Gender-Responsive United Nations Peacekeeping Operations. May 1, 2024. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo-2024-01441_un_gender_responsive_peacekeeping_policy_2024.07.pdf.

United Nations Secretary-General. Conflict-Related Sexual Violence: Report of United Nations Secretary-General. Office of The Special Representative of The Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, 2026. https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2025/08/report/report-of-the-secretary-general-on-conflict-related-sexual-violence/SG-Report-2024-FINAL.pdf.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/